
**Strategi Nahdlatul Ulama dalam Mempertahankan Posisi dan Legitimasi
di Arena Islam Indonesia**

M. Mujibuddin SM
Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Mujibuddin79@gmail.com

Naskah diterima:12-01-2018, direvisi: 25-01-2019, disetujui 28-01-2019

Abstract

This article aims to analyze NU's strategy in maintaining the arena of moderate Islam in Indonesia. This strategy was used by NU to anticipate the radical movement intending to seize the Indonesian Islamic arena. This is because NU has legitimacy as a moderate organization in Indonesia. This study uses observational studies by looking at the historicity of NU as a religious organization and its role in the Indonesian Islamic arena. This study uses the theory of genetic structuralism which includes habitus, arena, capital, trajectory, and strategy. The results of this study indicate that NU basically has the capital to maintain the arena of moderate Islam in Indonesia. The accumulation of capital is then at stake with two strategies, that efforts to maintain and widen the arena of power in Islam in Indonesia has a great opportunity.

Keyword: Nahdlatul Ulama, Arena, Habitus, Modal.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi NU dalam mempertahankan arena Islam moderat di Indonesia. Strategi ini digunakan oleh NU untuk mengantisipasi gerakan radikal berkeinginan untuk merebut arena Islam Indonesia. Hal ini dikarenakan NU telah memiliki legitimasi sebagai ormas moderat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi observasi dengan melihat historisitas NU sebagai organisasi keagamaan dan pegulatannya dalam arena Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori strukturalisme genetik yang mencakup habitus, arena, modal, trajektori, dan strategi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NU pada dasarnya memiliki modal untuk mempertahankan arena Islam moderat di Indonesia. Akumulasi modal tersebut kemudian dipertaruhkan dengan dua strategi, sehingga upaya untuk mempertahankan dan memperlebar kuasa dalam arena Islam di Indonesia memiliki peluang yang besar.

Keyword: Nahdlatul Ulama, Arena, Habitus, Modal.

Pendahuluan

Sejarah telah mencatat bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Ini merupakan realitas objektif yang tidak bisa dibantah. Sejak jatuhnya kerajaan Hindu-Budha hingga revolusi, jumlah umat Islam menunjukkan kenaikan yang signifikan. Dominasi ini membuat sejumlah umat muslim ingin menjadikan Islam sebagai ideologi pada saat revolusi akan bergulir. Akan tetapi hal itu ditentang oleh Soekarno karena tidak

sesuai dengan keragaman bangsa. Soekarno yang beragama Islam pun menolak adanya gagasan semacam itu. Hal ini menunjukkan bahwa kontestasi di arena Islam Indonesia sudah terjadi sejak awal mula Indonesia berdiri. Perebutan arena ini kemudian menjadi diskursus yang panjang. Tatkala Indonesia sudah merdeka, di sebagian umat muslim masih ada yang menginginkan untuk didirikannya negara Islam Indonesia (selanjutnya NII) yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Akan tetapi, usaha untuk merebut kuasa berakhir tanpa hasil, dan Kartosoewirjo mendapat hukuman mati.

Selama itu pula, arena Islam di Indonesia dikenal dengan moderat. Hal ini tidak lepas dari peranan dari dua ormas besar yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang selama ini telah konsisten untuk menunjukkan berIslam secara moderat (Darajat, 2017, p 7). Menurut Buya Syafi'i Maarif NU dan Muhammadiyah sudah sejak lama bekerja sama untuk menunjukkan Islam yang toleran, damai, bersikap ramah terhadap siapa saja, bahkan terhadap kaum yang tidak beriman sekalipun (Wahid, 2009, p. 7). Hal itu yang menandakan bahwa kedua ormas itu merupakan organisasi moderat di Indonesia. Bukti dari moderatnya NU dan Muhammadiyah terletak pada penerimaan dasar Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahid, 2009, p. 47).

Pergulatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam arena Islam Indonesia tidak bisa dilepaskan dari arena kekuasaan. Pada zaman kemerdekaan, para tokoh-tokoh NU terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan pada tanggal 22 Oktober K.H Hasyim Asy'ari, pendiri NU, dimintai untuk mengeluarkan fatwa terkait mempertahankan Indonesia. Pada masa Orde Baru, NU yang awalnya terlibat dalam arena partai politik justru mengembalikan sebagai organisasi keagamaan yang bergerak di jalur kultural. Represi Orde Baru justru direspon oleh NU dengan sikap kembali ke Khittah. Peranan NU dalam partai politik di cabut pada tahun 1983. Di samping itu juga, pergulatan arena Islam Indonesia dalam perkembangannya sudah tidak lagi membahas persoalan tradisional maupun modernis, akan tetapi lebih dari itu, bahwa banyak pemikir-pemikir NU yang lahir dari reformasi yang memberikan angin dalam arena Islam Indonesia. Carol Kersten mencatat bahwa pergulatan wacana Islam Indonesia di era reformasi di tandai dengan tiga isu utama, yaitu persoalan Hak Asasi Manusia (HAM), Pluralisme Agama, dan Kebebasan Berpikir (Kersten, 2016, p. 249). Perkembangan pemikiran seperti ini

dalam tubuh NU tidak lepas dari tantangan setelah reformasi. Pada saat itu muncul kelompok dari luar dominan, seperti Front Pembela Islam (FPI), Partai Keadilan (sekarang PKS), dan ormas lainnya yang dianggap ‘keras’ dan ingin mendapatkan legitimasi dari umat Islam. Dalam bahasa Bourdieu kelompok ini disebut heterodoksa (Grenfell & Ebrary, 2010, pp. 123–124). Kelompok-kelompok ini mencoba menguasai arena Islam Indonesia dengan berbagai strategi dan modal yang di miliki.

Kontestasi perebutan arena Islam sangat terlihat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Muhammad Iqbal Ahnaf, terdapat dua hal yang menentukan perebutan perang posisi yaitu ruang dan wacana. Wacana akan menang ketika narasi dominan yang terbentuk adalah polarisasi antara kemapanan dan perlawanan. Masyarakat yang terpolarisasi spektrum sosial antara ekstrem dan moderat menjadi tampak lebih sederhana dari kenyataannya. Kemampuan untuk memenangkan wacana ini akan lebih lengkap ketika gerakan sosial berhasil menguasai arena. Sebab mobilisasi tidak mungkin terjadi tanpa ada arena, dan arena ini ada ketika batas toleransi antara radikal dan moderat kabur (Ahnaf, 2016, p. 35). Kekaburan batas toleransi dalam arena Islam moderat di Indonesia ini kemudian menjadi tempat kontestasi antar wacana.

Dalam konteks inilah, dalam penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana strategi investasi simbolik NU dalam mempertahankan Islam moderat di arena Indonesia. Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimana strategi NU dalam mempertahankan Islam moderat di arena Indonesia, sebab saat ini sedang terjadi kontestasi Islam moderat vs Islam radikal yang telah berhasil mengaburkan keduanya di arena Islam Indonesia. Manfaat penelitian ini secara praktisnya adalah agar masyarakat mengetahui strategi yang dilakukan NU untuk mempertahankan Islam moderat di arena Indonesia.

Arena menurut Pierre Bourdieu lebih dipandang sebagai hubungan relasional ketimbang secara struktural. Arena adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya. Bourdieu juga melihat bahwa arena merupakan arena pertempuran atau perjuangan (Ritzer & Goodman, 2012, p. 583). Dengan pengertian semacam itu menunjukkan bahwa arena yang dimaksud oleh Bourdieu memiliki konotasi persaingan atau perebutan posisi sehingga struktur sosial bersifat dinamis di mana agen bisa berpindah dari satu posisi ke posisi lain (Karnanta, 2013, p. 5). Posisi dari berbagai agen di arena tersebut ditentukan oleh jumlah dan bobot modal yang mereka kuasai. Modal memungkinkan untuk

mengendalikan nasib orang sendiri. Modal dalam pandangan Bourdieu terdapat empat macam; *Pertama*, modal ekonomi; kedua, modal sosial; ketiga, modal kultural; keempat, modal simbolis (Harker, 2009, p. 17), sedangkan Habitus adalah struktur mental atau kognitif seseorang untuk berhubungan dengan dunia sosial. Orang diberi serangkaian skema internalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsikan, memahami, mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Singkatnya, habitus adalah produk internalisasi struktur dunia sosial (Ritzer & Goodman, 2012, p. 581). Dengan adanya arena, habitus, dan modal akan melahirkan konsep praktik. Inti dari praktik adalah proses internalisasi eksternalitas dan eksternalisasi internalitas. Praktik individu atau kelompok sosial harus dianalisis sebagai hasil interaksi habitus dan ranah (Harker, 2009, p. 18).

Perebutan legitimasi atau posisi dalam arena tidak dilakukan dengan tangan kosong. Setiap agen memiliki akumulasi modal sendiri untuk dipertaruhkan dalam pertarungan tersebut. Menurut Bourdieu, setiap agen sosial yang melakukan pertarungan simbolik dalam suatu arena akan mengerahkan habitus, kapital, dan trajektori yang mereka miliki (Fauzi, 2014, pp. 20–21). Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk adalah konsep Bourdieu terkait dengan strategi. Strategi merupakan suatu praktik yang digunakan untuk mempertahankan dominasi atau melebarkan kekuasaan dalam suatu arena (Bourdieu, 1990, p. 61). Selanjutnya Bourdieu membagi strategi menjadi dua macam yaitu strategi rekonversi modal dan strategi reproduksi. Strategi reproduksi dilihat sebagai kumpulan praktik yang dirancang oleh agen untuk mengolah, memperluas, mempertahankan dan meningkatkan posisi, sedangkan strategi rekonversi modal mengacu pada mobilitas agen dalam ruang sosial berdasarkan pertukaran dan pembentukan yang dimilikinya ke dalam modal-modal spesifik yang berlaku dalam arena tersebut (Harker, 2009, p. 23). Haryatmoko (dalam Karnanta, 2013, p. 6) menjelaskan konsep strategi Bourdieu bisa dipahami sebagai berikut: *(a) strategi investasi ekonomi yang terkait dengan dengan menambah serta mempertahankan modal ekonomi; (b) strategi investasi simbolik, mempertahankan dan meningkatkan pengakuan sosial yang didapat; (c) strategi investasi biologis, kontrol pengaturan jumlah keturunan; (d) strategi pewarisan, terkait dengan modal ekonomi sebagai modal signifikan dalam arena kekuasaan; (e) strategi pendidikan, yakni praktik yang mengarah pada usaha menghasilkan pelaku sosial yang memiliki keahlian tertentu.*

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah kualitatif dengan model observasi. Model kualitatif ini digunakan supaya hasil yang didapat lebih objektif. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primernya ialah buku-buku atau jurnal yang terkait dengan NU, sedangkan sumber sekundernya ialah buku-buku atau jurnal yang terkait dengan Islam di Indonesia secara umum.

Trajektori NU dalam Arena Islam Indonesia

Kehadiran NU dalam arena Islam Indonesia membuat warna arena Islam Indonesia terlihat beragam. Keberadaannya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Berbagai tantangan dan hadangan selalu menyertai setiap gerakannya, baik dari ormas Islam maupun dari penguasa, namun, NU masih tetap bisa menyesuaikan dengan keadaan zamannya. Semangat ini tidak lepas dari keyakinannya bahwa Islam berlaku di setiap waktu dan tempat. Ini bisa dilihat dari trajektori NU sejak lahir hingga hari ini. Lintasan sejarah yang pernah dilaluinya membuat NU semakin berkembang sesuai dengan zaman.

Secara teoritik, Bourdieu menjelaskan bahwa trajektori, lintasan sejarah, dan biografi yang dikonstruksikan digunakan secara bergantian. Ia menjelaskan bahwa;

“Biografi atau lintasan sejarah yang dikonstruksikan sebagai serangkaian gerak suksesif seorang agen di dalam ruang yang terstruktur yang mengalami penggantian dan distorsi di dalam struktur distribusi jenis-jenis modal berbeda yang dipertaruhkan di dalam arena.”(Bourdieu, 2010, p. 58)

NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama yang terkemuka pada saat itu. Tujuan didirikannya NU adalah untuk memperjuangkan kepentingan Islam tradisional. Pada saat itu tantangan yang dihadapi oleh kalangan tradisional datang dari kelompok modernis terutama di Arab Saudi. Pemerintahan Ibnu Saud akan menyelenggarakan kongres kekhalifahan di Mekkah untuk mendirikan kekhalifahan baru. Dengan adanya kekhalifahan ini, ulama tradisional Indonesia takut ketika tradisi Islam yang selama ini berjalan di Arab Saudi digantikan oleh faham Wahabi. Atas dasar inilah kemudian K.H Wahab Hazbullah mengundang seluruh ulama tradisional di Surabaya, dengan tujuan agar dibentuk sebuah komite dan delegasi ke Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan dua rumusan:

- 1) Membentuk komite Hijaz untuk mengirimkan delegasi dan menemui Raja Ibnu Suud.
- 2) Membentuk sebuah organisasi yang berfungsi sebagai wahana untuk para ulama dalam membimbing para ulama mencapai kejayaan, dan organisasi tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama (Ismail, 2002, p. 77).

Hasil dari pertemuan tersebut ialah dikabulkannya permintaan yang berkaitan dengan empat madzhab dan permintaan lainnya tidak dikabulkan. Ketika pada Mukhtamar 1928, NU baru menyusun anggaran dasarnya untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Hindia Belanda. Pada akhirnya pengakuan tersebut diterima pada tanggal 6 Februari 1930 (Feillard, 1999, p. 11).

Pada tahun-tahun selanjutnya NU juga dijadikan sebagai upaya untuk mencapai kemerdekaan. Dibentuknya NU merupakan langkah awal untuk menuju kemerdekaan dan dengan begitu maka NU juga melawan adanya kolonialisme yang sedang terjadi di Indonesia. Menurut penuturan Kiai Wahab Hazbullah bahwa kita jangan putus asa dan kita harus yakin negeri merdeka. Hal ini dibuktikan dengan menyanyikan lagu kebangsaan pada tahun 1930 (Feillard, 1999, p. 14). Pada tahun 1937 NU masuk dalam MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia). Ini merupakan sebuah langkah awal untuk menentukan arah politik umat Islam sebelum perang dunia kedua. Langkah ini kemudian dilanjutkan dengan dukungan wakil NU di MIAI kepada GAPI agar Indonesia berparlemen (Feillard, 1999, p. 17). Akan tetapi, pada tahun 1943- tepatnya pada saat Jepang menjajah- MIAI dibubarkan dan digantikan oleh Masyumi (Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia). Hanya Muhammadiyah dan NU yang diperbolehkan penjajah untuk masuk Masyumi. Setahun setelah itu, tepatnya bulan Agustus 1944, NU untuk pertama kalinya masuk dalam jajaran pemerintahan dengan diberikannya jabatan Shumubu (kantor urusan agama Islam buatan Jepang) yang diserahkan kepada K.H Hasyim Asy'ari. Pada tahun itu juga, Wahid Hasyim meminta Jepang agar mendidik para santri untuk jadi militer dan mengizinkan mereka untuk membentuk barisan Hizbullah dan Sabilillah (Feillard, 1999, p. 26).

Pada awal kemerdekaan, posisi NU sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Kegentingan yang terjadi pada 18 Agustus 1945 untuk mencabut Piagam Jakarta menuai perdebatan yang sangat panjang. Wakil NU dalam rapat tersebut ialah Wahid Hasyim. Pada saat itu, Wahid Hasyim meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia menerima

perubahan dalam Piagam Jakarta. Hal ini dikarenakan kuatnya rasa persatuan yang ada dalam Wahid Hasyim, dan menurutnya ini merupakan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang dasar terkait kebebasan beragama (Feillard, 1999, p. 36). Dua tahun kemudian K.H. Hasyim Asy'ari wafat dan digantikan oleh K.H. Wahab Hazbullah sebagai Rais Aam pada tahun 1950. Pada tahun 1952, melalui Mukhtar Palembang, NU mendirikan parpol sendiri yaitu Partai NU dan mengikuti pemilu tahun 1955. Dalam perkembangannya, partai NU memang semakin kuat akan tetapi cara-cara ini telah menyebabkan semakin menguatnya sayap politik hingga otoritas para ulama menjadi berkurang. Meskipun demikian, pada tahun 1954 diadakan konferensi para ulama di Cipanas di bawah pimpinan menteri agama, Kiai Masykur, telah mengangkat Soekarno sebagai “Waliyyul Amri ad-Daruri bisy-syaukah”, gelar ini menjadikan Soekarno sebagai kepala negara yang sah dan harus dipatuhi oleh semua umat Islam. Keputusan ini disambut baik oleh Kiai Wahab. Katanya, menurut fiqih, wanita Islam yang tidak mempunyai wali nasab, perlu dinikahkan di depan wali hakim, supaya anaknya tidak menjadi anak zina. Karena itu, maka ditetapkan bahwa yang harus menjadi wali hakim pada masa ini ialah Kepala Negara kita, yang kemudian diwakili oleh pejabat. Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah yang sekarang ini memang pemerintah yang sah dan wajib ditaati (Feillard, 1999, p. 42). Meskipun NU telah menjadi partai politik, akan tetapi hal itu tidak berjalan lama. Pada tahun 1973 NU dimasukkan atau fusi ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) (Bruinessen, 1994, p. 102).

Keterlibatan NU dalam politik benar-benar terhenti pada tahun 1983 pada saat Munas Ulama di Situbondo. Dalam pertemuan Munas tersebut menghasilkan dua keputusan yang penting; pertama, NU keluar dari PPP; kedua, mengikuti tuntutan asas tunggal. Pada Mukhtar ke 27 yang diadakan di tempat yang sama setahun kemudian mempertegas adanya keputusan Munas Ulama tersebut (Bruinessen, 1994, p. 113). Pada tahun ini juga, KH. Achmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa NU kembali ke khittah 1926 dengan lebih berkonsentrasi pada kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi (Fealy & Barton, 2010, p. 3). Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, NU selepas keluar dari partai politik melibatkan dirinya dalam LP3ES untuk pengembangan pesantren dan masyarakat. Hal ini merupakan sebuah wujud dari politik praktis NU selama kepemimpinan Gus Dur. Badan-badan baru pun mulai terbentuk untuk mewujudkan pengabdian di masyarakat. Misalnya adanya Lembaga

Pengembangan dan Pembangunan Pertanian NU dan Lembaga Pengarang dan Penerjemah yang didirikan pada tahun 1985; Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) pada tahun 1986 (Feillard, 1999, pp. 263–264).

Melalui lembaga-lembaga inilah kemudian NU mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini terbukti ketika era reformasi muncul banyak tokoh-tokoh pemikir muslim dari NU. Banyak di antara mereka yang telah mengembangkan pemikiran keIslaman di Indonesia. Bahkan di antaranya juga memperlihatkan kecenderungan berpikir untuk memadukan antara ilmu Islam dan ilmu sosial yang sedang berkembang. Kalangan NU menempatkan agama sebagai sub kultur di tengah kultur bangsa Indonesia. NU tidak mengambil bentuk formalisme atau modernisme yang berkembang pasca reformasi, akan tetapi NU lebih memilih untuk tetap berada dalam koridor tradisionalismenya. Oleh karenanya, corak pemikiran baru pun muncul di tubuh intelektual muda NU sebagai bentuk pemikiran yang lebih transformatif dan konstruktif untuk membangun bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh muda NU pasca reformasi yang masuk dalam ciri tersebut di antaranya Ahmad Baso, Ulil Abshar Abdala, Masdar F. Mas'udi, dan Said Aqil Siraj. Pengembangan wacana tersebut justru menyentuh persoalan-persoalan yang tidak biasa di kalangan NU. Singkatnya, kultur hibrida yang terjadi pada pemikir muda NU telah mewarnai arena Islam Indonesia pasca reformasi.

Salah satu pemikiran yang cukup menyita perhatian pada tahun 2000-an ke atas, sebagaimana yang diulas oleh Carol Kersten, terkait dengan pluralisme, Hak Asasi Manusia, kebebasan berpikir (Kersten, 2016, p. 249). Ketiga isu tersebut setidaknya memberikan gambaran kepada kita keterlibatan anak muda NU dalam kancah intelektual telah menjadi warna tersendiri di tengah arena Islam Indonesia. Di samping itu juga, dengan adanya perkembangan pemikiran pasca reformasi tersebut membuat catatan NU semakin beragam. Dimulai dari NU sebagai organisasi keagamaan; kedua NU sebagai organisasi keagamaan sekaligus partai politik; dan ketiga, NU kembali ke visi sosial keagamaan semula (Fealy & Barton, 2010, pp. 1–2).

Pergulatan NU dalam Arena Islam di Indonesia Pasca Orde Baru

Pergulatan dalam arena Islam Indonesia pasca Orde Baru terlihat jelas. Selama Orde Baru berlangsung, arena Islam di Indonesia bisa dikatakan pasif. Kontrol penguasa terhadap arena Islam sangat terlihat nyata. Represi dilakukan demi menjaga stabilitas politik Orde Baru. Penguasa Orde Baru tidak ingin politik Islam berkembang. Oleh

karenanya Orde Baru menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan arena Islam di Indonesia. Pergulatan antara kalangan tradisional dan modernis seakan-akan terkubur atas adanya represi tersebut. NU sebagai organisasi terbesar selama ini juga tidak bisa berbuat banyak. Meskipun dalam rentang waktu tertentu NU pernah menjadi partai politik, namun hal itu tidak menjamin mereka untuk bisa menguasai kontrol kekuasaan.

Keberadaan arena Islam Indonesia masih berada dalam bingkai kekuasaan. Dalam arena reproduksi kultural Bourdieu melihat bahwa arena sastra masih berada dalam naungan kekuasaan (Bourdieu, 2010, p. 5). Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik berada dalam arena yang jauh lebih luas cangkupannya. Seorang penguasa mampu mengendalikan arena-arena yang lain untuk kepentingannya. Meskipun secara spesifik sebuah arena memiliki otonomi sendiri, akan tetapi arena tersebut masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Hal ini terbukti ketika arena Islam Indonesia pada masa Orde Baru tidak bisa berbuat banyak dalam lingkarannya. Di luar arena Islam, penguasa Orde Baru bisa mengendalikan arena Islam melalui jalur politik.

Kendali atas arena Islam Indonesia oleh Orde Baru sangat terlihat nyata. Pada tahun 1966, pemerintah melalui Angkatan Bersenjata membuat sebuah seminar untuk mensosialisasikan terkait asas tunggal Pancasila. Upaya ini baru dilaksanakan pada tahun 1975, tetapi menuai kegagalan karena mendapat respon negatif dari masyarakat. Upaya ini kemudian dilanjutkan pada tahun 16 Agustus 1982 saat sidang Paripurna DPR berlangsung. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan keluarnya UU No. 3 Tahun 1985 tentang Kepartaian dan Keormasman, yang mengatur bahwa asas selain Pancasila tidak lagi diperbolehkan (Humaidi, 2010, p. 295). Ini merupakan sebuah proses peminggiran yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap umat Islam. Orde Baru tidak menginginkan gerakan umat Islam berkembang, bahkan Orde Baru juga melarang untuk mengaktifkan kembali Masyumi dan menyatukan seluruh aspirasi politik umat Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di tambah lagi Orde Baru juga membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah untuk bersatunya organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Meskipun demikian, MUI tetap memiliki perbedaan dengan ormas NU. MUI dilahirkan oleh pemerintah untuk tujuan tertentu. Sedangkan NU lahir dari kesadaran umat Islam pada saat itu karena ada gerakan Wahabi yang sudah menyebar ke mana-mana. Dalam arena Islam Indonesia, MUI pada masa Orde Baru penuh syarat akan kepentingan

penguasa dan ini sangat bertentangan dengan NU yang justru menjaga jarak dengan pemerintah.

Tampilnya Abdurrahman Wahid sebagai tokoh NU dalam arena Islam Indonesia memberi nuansa baru. Pergulatan pemikiran terkait dengan tradisionalisme dan modernisme semakin terlihat nampak. Di samping Gus Dur tampil dengan mengambil oposisi terhadap penguasa, Gus Dur juga memberikan wacana segar bagi NU untuk tampil dalam arena Islam Indonesia. Wacana segar yang ditawarkan oleh Gus Dur dalam arena Islam Indonesia ialah tentang tradisionalisme NU yang dipadukan modernitas. Dalam hal ini Gus Dur melandasinya dengan kaidah fiqh “al-Muhāfadẓatu ‘alā qadimi al-Ṣāliḥ wa al-Akhu bi al-jadīd al-Aṣlah” (menjaga tradisi-tradisi lama yang baik sembari menyesuaikan dengan tradisi baru yang baik). Upaya Gus Dur yang sangat potensial adalah, di samping mengembalikan NU ke Khittah, serta penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi kelembagaan. Dalam hal ini, K.H. Achmad Shidiq, selaku Rais Aam pada saat Gus Dur menjadi PBNU, mengatakan bahwa:

“Islam merupakan tindakan agama sedangkan Pancasila adalah pandangan hidupnya. Pemerintah selalu menekankan tidak ada maksud untuk menjadikan Pancasila sebagai agama atau memperlakukan Pancasila seolah-olah agama. NU menanggapi pernyataan pemerintah itu dengan serius dan yakin pemerintah tidak mengajak NU menerima Pancasila dengan cara mereduksi keyakinan Islam. NU menerima Pancasila bukan dalam pengertian politik, melainkan lebih karena pemahaman hukum Islam”(Fealy & Barton, 2010, p. 130)

Sikap oposisi yang ditunjukkan oleh Gus Dur selaku tokoh sentral NU menunjukkan bahwa hingga akhir masa Orde Baru arena Islam Indonesia masih didominasi oleh pergulatan antara arena Islam dan politik. NU sebagai organisasi yang sudah terlegitimasi tidak memiliki daya untuk menandingi kekuasaan pada masa Orde Baru. Bahkan Orde Baru mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menjatuhkan legitimasi NU dari posisinya. Akan tetapi, segala upaya pemerintah untuk melemahkan legitimasi NU terbukti gagal. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi NU yang hingga hari ini masih mendominasi keberislaman di Indonesia. Akan tetapi, tantangan tersebut tidak berakhir ketika Orde Baru jatuh. Sebab, jatuhnya Orde Baru seakan-akan membuka keran kebebasan yang selama ini ditutup oleh Orde Baru.

Ketika reformasi bergulir, muncul beberapa organisasi Islam yang memiliki pemikiran di luar mainstream. Jika pada saat Orde Baru berkuasa, arus mainstream selama itu dikuasai oleh NU dan Muhammadiyah, akan tetapi di masa reformasi muncul beberapa organisasi yang memiliki ideologi yang berbeda dengan NU dan Muhammadiyah. NU

yang selama ini telah terlegitimasi mendapat tantangan baru dalam arena Islam Indonesia. perebutan dalam arena Islam Indonesia pun semakin terlihat. Secara umum gerakan Islam yang muncul pasca Orde Baru adalah; *Pertama*, gerakan Islam kebangsaan yang bertransformasi ke gerakan politik praktis. *Kedua*, gerakan Islam yang bertransformasi dari politik ke dakwah yang melahirkan ormas-ormas Islam subtansialistik dan kelompok Islam legal-formalistik (Ismail Hasani & Naipospos, 2012, p. 10). Untuk kelompok yang kedua ini, banyak ormas yang mengusung ideologi Islamisme dalam gerakannya. Hal ini berdampak pada adanya perebutan wacana dalam arena Islam Indonesia, yang semula diskursus Islam politik tidak terlalu menonjol akan tetapi setelah Orde Baru gerakan ini semakin menampakkan dirinya. Misalnya Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa kelompok Islamis lainnya yang menginginkan adanya Perda Syariah di berbagai wilayah di Indonesia (Nashir, 2013, p. 281).

Dengan adanya gerakan seperti itu, maka polarisasi antara Islam moderat dan radikal semakin nampak. Bahkan NU dan Muhammadiyah secara tegas menolak adanya gerakan Islam radikal di Indonesia, serta kedua ormas ini juga bekerja sama untuk melawannya. Kedua ormas ini kemudian dikenal secara lebih luas sebagai ormas moderat di Indonesia. Sebuah ormas dikatakan moderat setidaknya memiliki lima ciri; pertama, menerima demokrasi; kedua, menolak gagasan negara Islam; ketiga, adanya penghormatan dengan prinsip HAM; keempat, menghormati hak perempuan dan minoritas; kelima, menolak terorisme dan kekerasan (Darajat, 2017, pp. 89–90).

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, polarisasi antara Islam moderat dan radikal semakin kabur. Hal ini dikarenakan arena Islam Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini sudah banyak dikuasai oleh gerakan radikal, terutama kelas menengah muslim perkotaan. Hal ini dikarenakan gerakan radikal di Indonesia menggunakan politik sebagai jalan tempuhnya. Kemunculan ini didominasi oleh faktor ekonomi yang selama ini negara dianggap gagal dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam penelitian Wasistro Raharjo Jati, kemunculan Islamisme seperti di atas dikarenakan faktor marginalisasi ekonomi yang dilakukan semasa Orde Baru (Jati, 2015, p. 142). Dengan perkataan lain, kemunculan model Islam seperti yang terlihat di akhir-akhir ini disebut Islam populer. Islam populer merupakan bentuk hadirnya budaya Islam di ruang publik yang diinisiasi oleh muslim kelas menengah perkotaan. Hal ini merupakan bentuk dari negosiasi dan improvisasi yang dilakukan oleh muslim kelas menengah perkotaan dengan budaya

modernitas, liberalisme, dan hedonisme. Sedangkan Islam populer sebagai habitus dimaknai dalam bentuk perilaku yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan tersendiri dan berbeda dengan kelompok muslim lainnya. Konstruksi habitus seperti itu kemudian membedakan antara kelompok muslim kelas menengah perkotaan dan kelas lainnya. Oleh karena itu, hal ini kemudian yang menjadikan kabur makna antara Islam radikal dan moderat terutama dalam masyarakat muslim perkotaan. Sebagai bukti bahwa kaburnya kedua kelompok muslim ini pada saat rangkaian gerakan Aksi Bela Islam di Jakarta tahun 2016 akhir. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa massa aksi yang terlibat dalam gerakan tersebut tidak melihat ormasnya dari mana. Secara umum, gerakan tersebut tidak hanya diikuti oleh FPI dan kawan-kawan, akan tetapi dari pihak ormas moderat pun ikut terlihat dalam aksi tersebut. Ini menandakan bahwa habitus kelompok muslim menengah perkotaan telah berhasil mengkonstruksikan lebih luas lagi ke semua lapisan masyarakat, sehingga ini menjadi modal kultural bagi kelompok muslim menengah perkotaan.

Pergulatan dalam arena Islam Indonesia antara Islam moderat dan radikal akan mengerahkan semua modal yang dimilikinya. Modal-modal tersebut akan diakumulasikan sehingga akan menjadi kekuatan untuk bertarung dalam arena Islam Indonesia. Untuk mempertahankan legitimasi sebagai organisasi moderat di Indonesia, NU juga akan mengakumulasikan modal-modalnya untuk dipertaruhkan dalam arena tersebut. Terutama modal simbolik yang selama ini telah dimiliki oleh NU. Modal simbolik ini diantaranya ialah NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia; NU sebagai organisasi moderat di Indonesia; NU memiliki pendidikan Islam pesantren yang hingga hari ini terus mengalami kemajuan. Di sisi lain, NU juga memiliki modal sosial yang terkait dengan jaringan atau relasi sosial dengan kekuasaan. Hal ini diperlihatkan adanya keterlibatan secara aktif anggota NU yang masuk dalam pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Modal budaya yang mentikberatkan pada individu anggota NU yang memiliki pendidikan maju, serta pemikiran yang progresif. Ketiga modal ini juga bisa dipertukarkan dengan jenis modal lainnya (Bourdieu dalam Richardson, 1986, p. 243). Penukaran modal yang paling hebat ialah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah bentuk-bentuk modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang legitimit (Harker, 2009, p. 17). Penentuan hierarki kekuasaan tergantung pada akumulasi modal yang dimilikinya. Jika agen memiliki ke empat jenis modal yang

dijelaskan oleh Bourdieu maka ia hampir dipastikan menempati posisi hierarki tertinggi, sementara yang hanya menguasai beberapa modal saja maka ia menempati posisi hierarki kelas menengah, dan jika agen hanya menguasai satu modal saja maka ia berada dalam posisi hierarki terendah (Karnanta, 2013, p. 11).

Ketiga modal tersebut telah dimiliki oleh NU dan akan dipertaruhkan dalam arena Islam Indonesia. Pergulatan ini bukan dilakukan secara fisik akan tetapi simbolik. Agen-agen yang memiliki habitus dan modal berkontestasi dalam arena tersebut untuk memperebutkan kuasa simbolik. Bourdieu mendefinisikan kuasa simbolik sebagai:

“Kuasa untuk mengubah dan menciptakan realitas, yakni mengubah dan menciptakannya sebagai sesuatu yang diakui, dikenali, dan juga sah. Kuasa simbolik untuk membuat orang melihat dan percaya, untuk memperkuat atau mengubah cara pandang terhadap dunia dan bagaimana mengubah dunia itu sendiri” (Bourdieu dalam Karnanta, 2013, p. 12)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kuasa simbolik ini, seseorang secara tidak langsung akan diarahkan ke arah tertentu. Terjadinya mekanisme tersebut pengertian Bourdieu disebut doksa. Doksa ialah suatu pandangan mengenai suatu hal yang diterima apa adanya, dituruti dan tidak pernah dipertanyakan (Grenfell & Ebrary, 2010, p. 120). Proses terjadinya kuasa simbolik apabila otonomi arena itu melemah sehingga hal tersebut memungkinkan munculnya agen-agen baru untuk merebut kuasa tersebut. Bahkan agen-agen ini dimungkinkan bisa menggantikan, menentang, dan mempertanyakan doksa yang selama ini telah mendominasi. Bourdieu kemudian menyebut agen ini sebagai heterodoksa (Grenfell & Ebrary, 2010, pp. 123–124). Hal ini terjadi dalam arena Islam Indonesia yang semula telah dikuasai oleh NU, akan tetapi hal tersebut kemudian mendapat penentangan dari kelompok-kelompok yang baru muncul. Dengan adanya penentangan ini, NU akan berusaha untuk mempertahankan struktur arena yang didominasinya dengan memproduksi apa yang disebut ortodoksi (Karnanta, 2013, p. 12).

Strategi NU dalam Mempertahankan Arena Islam Indonesia

Legitimasi dan posisi yang telah diraih oleh NU selama ini bukan tidak mungkin mendapat tantangan dari kelompok luar yang ingin menguasai arena Islam Indonesia, terutama datang dari kalangan Islam radikal. Melihat adanya kekaburan polarisasi di atas, tentu tantangan tersebut tidak hanya isapan jempol. NU sebagai ormas yang sudah telah

mendapat legitimasi memiliki strategi untuk mempertahankannya. Dengan berbagai modal dan habitus yang dimiliki, tentu itu menjadi instrument yang penting untuk mempertahankan legitimasi dan posisi. Hal tersebut sudah terbukti ketika melihat bagaimana trajektori NU di atas yang mengalami perkembangan setiap tahunnya. Bahkan dengan strategi tersebut tidak hanya mempertahankan legitimasi yang telah diraihinya, namun hal itu juga bisa memperlebar kekuasaannya dalam arena Islam Indonesia (Bourdieu, 1990, p. 61). Strategi terkait langsung dengan praktek agen dalam ruang sosial dengan modal-modal tertentu. Bourdieu lebih lanjut menyebut strategi untuk menyebut tiga ide terkait praktek agen (Harker, 2009, p. 22);

- 1) Ide tentang perjuangan demi pengakuan sebagai dimensi fundamental kehidupan sosial. Perjuangan ini merupakan perjuangan atas akumulasi modal. Karenanya, mestilah ada suatu logika spesifik tentang akumulasi modal simbolik.
- 2) Ide tentang strategi sebagai sesuatu yang tidak sadar atau tidak terakumulasi maupun terdeterminasi secara mekanis, ia merupakan produk intuitif pengetahuan tentang aturan-aturan permainan.
- 3) Ide tentang adanya sebuah logika praktik- yang rinciannya bergantung pada tempat dan waktu yang spesifik atau mungkin bergantung pada suatu urutan peristiwa di dalam waktu.

Bourdieu kemudian membagi strategi menjadi dua tipe, yaitu strategi reproduksi dan strategi rekonversi (penukaran). Strategi reproduksi dilihat sebagai kumpulan praktik yang dirancang untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi. Strategi ini bergantung pada jumlah modal, kondisi instrument produksi, dan sebabainya. Kedua, strategi penukaran, sejumlah pergerakan dalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi, yakni keseluruhan jumlah modal dominan dan terdominasi. Misalnya penukaran modal ekonomi menjadi modal pendidikan-sebuah strategi yang memungkinkan bisnis mampu secara legitimasi mempertahankan posisi para pewarisnya (Harker, 2009, p. 23).

Strategi rekonversi yang dilakukan NU bisa dilihat melalui bagaimana peralihan peran dan fungsi organisasi NU sejak berdiri hingga kini. Terjadi banyak penukaran modal yang dilakukan NU untuk mempertahankan dan memperlebar sayap legitimasinya. Misalnya ketika NU yang awalnya menjadi organisasi sosial keagamaan beralih ke arena politik. Dengan modal yang telah dimilikinya, NU memiliki potensi untuk menguasai

seluruh ranah di Indonesia, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya. NU tidak memiliki pengaruh apapun dalam perpolitikan di Indonesia. Meskipun demikian, ketika NU dikembalikan lagi menjadi organisasi keagamaan banyak terjadi perubahan paradigma. NU dijadikan oleh Gus Dur menjadi organisasi yang terlibat secara aktif untuk mengembangkan masyarakat. Dengan begitu, maka kesempatan untuk menukarkan modal lainnya semakin terbuka.

Penukaran modal ini terlihat dalam ranah kultural di mana NU memiliki basis pendidikan tradisionalis yang kuat. Dalam perkembangannya, modal kultural ini kemudian ditukarkan dengan modal simbolik. Hal ini terjadi dengan apa yang dinamakan sebagai kelompok santri post-tradisionalisme. Suatu perkembangan pemikiran para santri tradisionalis dengan memadukan pemikiran Islam dan modernitas. Gerak ini kemudian menjadikan NU dan pesantren sebagai modal simbolik semata, akan tetapi ketika era Reformasi modal tersebut kemudian ditukarkan dengan modal sosial. Hal ini terlibat ketika kaum mudanya menampakkan dirinya sebagai intelektual muda. Artinya gerak perubahannya berlangsung pada tingkat wacana, lebih terencana dan sistematis (Hikam, Ridwan, & Hairus Salim H. S, 1999, p. 6). Wacana keIslaman yang selama ini telah didapat di pesantren, kemudian dicarikan padanannya dalam keilmuan modern seperti isu-isu feminism, hak asasi, demokrasi, lingkungan, dan seterusnya. Dalam perkembangannya, wacana ini kemudian dipertaruhkan dalam arena Islam Indonesia. penelitian dari Carol Kersten menunjukkan bahwa pertarungan wacana menunjukkan bahwa rekonversi modal yang dilakukan oleh NU sangat nampak. Melalui agen-agen atau individu-individu yang terlibat dalam keanggotaan NU, secara tidak langsung hal itu melibatkan NU dalam pertarungan wacana di arena Islam Indonesia sekarang, dan rekonversi modal ini akan bertahan dalam tahun-tahun berikutnya.

Selanjutnya strategi reproduksi. Strategi reproduksi ini digunakan oleh NU untuk mempertahankan legitimasi sebagai ormas moderat di Indonesia. Belakangan ini banyak ormas radikal yang ingin menguasai dan mendapatkan legitimasi dalam arena tersebut, sehingga dampak yang hari ini terlihat adalah adanya kekaburan antar keduanya seperti yang telah disinggung di atas. Untuk mempertahankan arena Islam moderat di Indonesia, NU mencoba memutar lagi memori kolektif pada para anggotanya. Memori kolektif atau ingatan kolektif ini bertujuan menciptakan ulang sebuah peristiwa masa lalu untuk

dijadikan dasar bagi peristiwa masa kini, dan sebagai pedoman untuk merumuskan masa depan (Fowler, 2009, p. 27).

Hal ini dibutuhkan karena wacana yang berkembang saat ini terkait isu Islamisasi ruang publik, baik secara parlementer maupun kultural. NU sebagai ormas yang moderat tidak menginginkan terjadinya hal demikian. Sebab, sebagaimana definisi moderat di atas, akan terjadi diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas ke minoritas. Oleh karena itu, untuk melawan radikalisasi tersebut NU mencoba mengingatkan kembali para anggotanya dengan masa lalu. NU sejak awal telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sah, dan semua warga negara harus menghormati dan mentaatinya, dan hal ini diperkuat dengan jargon kembali ke Khittah NU. Oleh karena itu, NU menjadi organisasi yang tidak menginginkan adanya diskriminasi juga tidak bersikap sebagai oposisi terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wibawa Islam yang moderat; Islam yang bisa merangkul semua golongan; serta menjadikan arena Islam Indonesia sebagai contoh negara-negara lain.

Kesimpulan

Pergulatan dalam arena Islam Indonesia setiap tahunnya mengalami dinamika yang panjang. Pergulatan ini melibatkan pelbagai ormas yang lahir sejak pra Revolusi hingga pasca Reformasi, sehingga keragaman wacana dalam arena Islam Indonesia sangat plural. Pergulatan ini melibatkan perbagai aspek modal dan habitus yang dimiliki oleh setiap ormas.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu ormas tertua di Indonesia selama ini telah berhasil merebut dan menguasai arena Islam Indonesia. Meskipun pada era Reformasi muncul banyak ormas radikal yang ingin menguasai arena Islam Indonesia, akan tetapi NU berhasil mempertahankan arena Islam Indonesia yang selama ini telah dikuasai. Dengan mempertaruhkan segala jenis modal dan habitus yang dimilikinya, NU kemudian menyusun strateginya untuk mempertahankan arena Islam Indonesia. Strategi tersebut meliputi rekonversi dan reproduksi. Hasilnya adalah NU hingga hari ini masih mampu mempertahankan arena Islam Indonesia yang dikenal moderat, toleran, inklusif. Hal ini dimaksudkan agar wajah Islam Indonesia bisa menjadi rahmat bagi semua.

Daftar Pustaka

- Ahnaf, M. I. (2016). "Aksi Bela Islam," Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia? Pengantar Redaksi, 30.
- Bourdieu, P. (1990). *In Other Words: Essays Towards a Reflexive Sociology*. Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*.
- Bruinessen, M. van. (1994). *NU: tradisi relasi kuasa pencarian wacana baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Darajat, Z. (2017). *Muhammadiyah dan NU: Penjaga Moderatisme Islam di Indonesia*. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 79–94.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.05>
- Fauzi, F. (2014). *Pierre Bourdieu: menyingkap kuasa simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/..index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=57027
- Fealy, G., & Barton, G. (2010). *Tradisionalisme radikal: persinggungan Nahdlatul Ulama-negara*. Yogyakarta: LKiS.
- Feillard, A. (1999). *NU vis a vis Negara ; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Lkis Pelangi Aksara.
- Fowler, B. (2009). *The obituary as collective memory*. New York: Routledge.
- Grenfell, M., & Ebrary, I. (2010). *Pierre Bourdieu key concepts*. Acumen.
- Harker, R. (2009). *Cheelen Mahar dan Chris Wilkes,(Habitus x Modal)+ Ranah= Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj.
- Hikam, M. A. S., Ridwan, M., & Hairus Salim H. S. (1999). *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di jalur kultural*. Yogyakarta: LKiS.
- Humaidi, Z. (2010). *Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal*. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2).
- Ismail, F. (2002). *Pijar-pijar Islam: pergumulan kultur dan struktur*. Yogyakarta: LESFI.
- Ismail Hasani, & Naipospos, B. T. (2012). *Dari radikisme menuju terorisme: studi relasi dan tranformasi organisasi Islam radikal di Jawa Tengah dan di Yogyakarta*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Jati, W. R. (2015). *Islam Populer sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia*. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 139–163.

- Karnanta, K. Y. (2013). Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu. *POETIKA: Jurnal Ilmu Sastra*, 1(1).
- Kersten, C. (2016). *Islam in Indonesia: the contest for society, ideas and values*.
- Nashir, H. (2013). *Islam syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Maarif Institute.
- Richardson, J. G. (1986). *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Publishing Group.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*.
- Wahid, A. (2009). *Ilusi negara Islam: ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute.